

PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KAWASAN WADUK JATIGEDE

Collaborative Governance-Based Tourism Development in The Jatigede Reservoir Area

¹ Rima Yudiawantini, ² M Nur Afandi

^{1,2} Politeknik STIA LAN Bandung

¹rimayudiawantini@gmail.com, ²m.n.afandi@stialanbandung.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article history :

Dikirim :

30-09-2025

Revisi Pertama :

06-06-2026

Diterima :

26-06-2026

Kata Kunci :

Model Pengembangan,
Collaborative Governance,
CATWOE, Pariwisata,
Waduk Jatigede, Menara
Kujang Sapasang,
Kolaborasi.

Keywords :

*Development model,
Collaborative Governance,
CATWOE, Tourism
Jatigede Reservoir,
Menara Kujang Sapasang,
Collaboration*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pengembangan pariwisata Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang melalui pendekatan Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007), serta dianalisis menggunakan metode Soft System Methodology (SSM) dengan alat bantu CATWOE. Kawasan Menara Kujang Sapasang sebagai bagian dari destinasi pariwisata unggulan di Waduk Jatigede menunjukkan potensi besar namun belum dikelola secara optimal karena rendahnya kolaborasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat yang terbatas, minimnya branding, serta keterbatasan infrastruktur. Teori Collaborative Governance digunakan untuk mengidentifikasi lima variabel utama dalam proses kolaboratif, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, proses kolaboratif, dan hasil. Setiap variabel dianalisis dengan elemen-elemen CATWOE untuk mengidentifikasi aktor, kepentingan, proses transformasi, dan kendala lingkungan yang mempengaruhi pengembangan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata di Waduk Jatigede sangat bergantung pada kepemimpinan fasilitatif, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, komitmen bersama, serta desain kelembagaan yang transparan dan inklusif. Model yang dihasilkan memberikan rekomendasi strategi kolaboratif yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bersama stakeholder lainnya untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Abstract

This study aims to formulate a tourism development model for the Jatigede Reservoir in Sumedang Regency using the Collaborative Governance approach as proposed by Ansell and Gash (2007), and analyzed through the Soft System Methodology (SSM) using the CATWOE tool. The Menara Kujang Sapasang area, as one of the flagship tourism destinations in Jatigede Reservoir, demonstrates significant potential but has not been optimally

managed due to limited cross-sectoral collaboration, low community involvement, lack of branding, and inadequate infrastructure. Collaborative Governance theory is used to identify five key variables in the collaborative process: starting conditions, institutional design, leadership, collaborative process, and outcomes. Each variable is analyzed using CATWOE elements to identify actors, interests, transformation processes, and environmental constraints that influence tourism development. The results of the study indicate that the success of tourism development in Jatigede Reservoir largely depends on facilitative leadership, inclusive stakeholder engagement, shared commitment, and transparent institutional design. The resulting model offers collaborative strategies that can be implemented by the Sumedang Regency Government in cooperation with other stakeholders to establish sustainable tourism governance that directly contributes to improving the welfare of the local community.

A. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Kabupaten Sumedang, berada pada Provinsi Jawa Barat, mempunyai 26 Kecamatan 270 Desa serta 7 Kelurahan, mempunyai kapabilitas pariwisata dengan cukup besar dengan kekayaan alam dan budayanya. Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat memanfaatkan kekayaan alam dan budayanya untuk mengembangkan sektor pariwisata, baik melalui pengelolaan objek wisata, promosi maupun penguatan infrastruktur pendukung. Pemanfaatan dan pengelolaan Sumber daya alam dan kebudayaan serta manusia yang baik terutama dalam sektor pariwisata, menciptakan kebermanfaatannya secara kompleks menyeluruh dan dapat menjadikan salah satu lokasi pariwisata terkemuka pada skala nasional maupun internasional. Tujuan dari Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sumedang yaitu guna memperbaiki taraf hidup warga, meningkatkan daya saing pariwisata yang unggul. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, aktivitas usaha mikro, serta pembangunan infrastruktur wilayah (Hall & Page, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, paradigma pengembangan destinasi wisata mengalami perubahan dari pendekatan berbasis pembangunan fisik menuju pendekatan pembangunan destinasi yang berkelanjutan (sustainable tourism development). Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan regulasi dalam mendukung keberhasilan pengembangan destinasi wisata (Baggio et al., 2019; Rasoolimanesh et al., 2021). Oleh karena itu, pengembangan kawasan wisata tidak lagi cukup hanya mengandalkan keindahan alam, tetapi juga memerlukan analisis strategis yang mampu mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan pembangunan pariwisata.

Berdasarkan Smiling West Java Tourism Book dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten menyajikan beragam destinasi dengan memikat. Mayoritas areanya dicirikan oleh konfigurasi pegunungan serta dataran tinggi, dengan menghasilkan atmosfer yang menyejukkan. Kondisi tersebut secara inheren menjelaskan mengapa sejumlah besar lokasi pariwisata pada Sumedang ialah tujuan wisata alam dengan menawarkan pemandangan memukau. Kekayaan potensi alamnya, meliputi berbagai bentuk seperti air terjun, perbukitan, pegunungan, area perkebunan, serta destinasi air berupa danau ataupun sungai, semua ada di Sumedang. Selain itu, Sumedang juga memiliki kekayaan wisata budaya, religi, kuliner, edukasi, serta wisata buatan yang berpotensi dikembangkan sebagai destinasi unggulan.

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh keberadaan potensi wisata, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola destinasi, kolaborasi antar pemangku kepentingan, ketersediaan infrastruktur, efektivitas promosi, dukungan kebijakan pemerintah, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal (Bramwell & Lane, 2011; Buhalis & Law, 2008; Nunkoo et al., 2022). Dengan demikian, keberadaan sumber daya wisata yang melimpah belum tentu mampu menghasilkan daya saing destinasi apabila tidak diikuti dengan strategi pengembangan yang komprehensif.

Kebijakan Kabupaten Sumedang menawarkan sejumlah daya tarik pariwisata, seperti destinasi berbasis alam, situs kebudayaan, tempat ibadah, lokasi pembelajaran, sentra kuliner serta wisata buatan. Beberapa investor yang tercatat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang juga tidak sedikit, hal ini sebagai salah satu penunjang agar pariwisata dapat dikembangkan secara baik. Kenyataannya para stakeholders di Pemerintah Kabupaten Sumedang belum memberikan perhatian secara khusus kepada sektor pariwisata sehingga hal ini menghambat dalam pengembangan sektor pariwisata secara maksimal.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji strategi pengembangan pariwisata menggunakan berbagai pendekatan, seperti analisis SWOT (Rangkuti, 2018), Community Based Tourism (Goodwin & Santilli, 2009), maupun pendekatan Sustainable Tourism Development. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada identifikasi faktor internal organisasi, pemberdayaan masyarakat, atau tata kelola kolaboratif. Namun demikian, penelitian yang mengintegrasikan analisis lingkungan eksternal secara menyeluruh melalui model Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008) pada kawasan wisata Kabupaten Sumedang, khususnya Kawasan Jatigede, masih sangat terbatas.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada analisis internal destinasi atau aspek kelembagaan, sedangkan dinamika lingkungan eksternal yang memengaruhi pengembangan kawasan wisata belum dianalisis secara komprehensif. Padahal perubahan kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi digital, perubahan perilaku wisatawan, isu keberlanjutan lingkungan, serta regulasi investasi merupakan faktor strategis yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan kawasan wisata pada era saat ini.

Salah satu pariwisata yang ada di Kabupaten Sumedang yaitu Kawasan Menara Kujang Sapasang Waduk Jatigede. Kondisi yang terjadi pada saat ini, berdasarkan wawancara pra penelitian dengan beberapa informan dari kabupaten/kota yang mengunjungi Kabupaten Sumedang mayoritas pengunjung dari luar kota Sumedang tertarik untuk berwisata ke wilayah Bandung Raya. Tidak sedikit juga berdasarkan wawancara pra penelitian dengan beberapa informan (masyarakat Kabupaten Sumedang) tertarik berwisata ke wilayah di luar Kabupaten Sumedang

Adapun persoalan yang terjadi di Kabupaten Sumedang yang berkenaan dengan pengembangan pariwisata diantaranya yaitu: kurangnya kolaborasi antar pihak dalam pengembangan pariwisata, minimnya kerja sama yang dijalin oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan pihak tertentu dalam mengoptimalkan pengembangan pariwisata, Komitmen Pemerintah Daerah Sumedang yang mencakup semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam pengembangan pariwisata belum optimal hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian khusus terhadap pentingnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumedang, proses pengembangan pariwisata di kawasan jatigede tidak melibatkan masyarakat, hasil pengembangan yang pada saat ini ada belum di branding atau dipasarkan dengan baik, pengembangan yang dilakukan di kawasan jatigede belum melibatkan investor secara optimal serta ketersediaan infrastruktur serta fasilitas di area jatigede terutama di kawasan menara kujang sapasang jatigede belum ada.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa merumuskan model pengembangan pariwisata Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang melalui pendekatan Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008), serta dianalisis

menggunakan metode Soft System Methodology (SSM) dengan alat bantu CATWOE. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategi pengembangan pariwisata yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan konvensional yang hanya berfokus pada faktor internal destinasi.

B. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengembangan pariwisata berbasis collaborative governance di Kabupaten Sumedang. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada suatu fenomena kontemporer yang terjadi dalam konteks nyata dan melibatkan berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda dalam pengembangan kawasan wisata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara komprehensif dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan pengembangan pariwisata (Yin, 2018; Creswell & Poth, 2016).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan fokus pada Kawasan Wisata Menara Kujang Sapasang Waduk Jatigede. Proses pengumpulan data dilaksanakan selama periode Desember 2024 hingga Juni 2025 melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan dokumen perencanaan pengembangan pariwisata.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Sumedang (Patton et al., 2015). Informan terdiri atas unsur pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pengelola destinasi wisata, pelaku usaha pariwisata, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar kawasan wisata. Pemilihan informan dilakukan secara bertahap hingga mencapai data saturation, yaitu kondisi ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi baru yang relevan dengan tujuan penelitian.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur sehingga peneliti tetap memiliki fleksibilitas untuk menggali informasi secara lebih mendalam sesuai perkembangan situasi di lapangan. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi infrastruktur, aktivitas wisata, serta bentuk kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Sumedang, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA), laporan Dinas Pariwisata, regulasi terkait, serta berbagai dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan menggunakan Soft Systems Methodology (SSM) yang dikembangkan oleh Checkland dan disempurnakan oleh (Checkland & Scholes, 1999). Berbeda dengan teknik analisis tematik konvensional, SSM digunakan sebagai kerangka berpikir sistemik untuk memahami permasalahan kompleks yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda. Implementasi SSM dalam penelitian ini dilakukan melalui tujuh tahapan berikut.

1. Tahap pertama (Problem Situation Unstructured), peneliti mengidentifikasi berbagai persoalan pengembangan pariwisata melalui observasi lapangan, studi dokumen, dan wawancara dengan para pemangku kepentingan.
2. Tahap kedua (Problem Situation Expressed), berbagai persoalan yang ditemukan divisualisasikan dalam bentuk rich picture untuk menggambarkan hubungan antaraktor, konflik kepentingan, hambatan kelembagaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan kawasan wisata Jatigede.

3. Tahap ketiga (Root Definition), peneliti menyusun definisi sistem menggunakan pendekatan CATWOE (Customers, Actors, Transformation, Worldview, Owners, Environmental Constraints) untuk mengidentifikasi perubahan yang diharapkan dalam sistem pengembangan pariwisata.
4. Tahap keempat (Conceptual Model), berdasarkan hasil CATWOE disusun model konseptual yang menggambarkan aktivitas ideal dalam pengembangan pariwisata berbasis collaborative governance di Kabupaten Sumedang.
5. Tahap kelima (Comparison), model konseptual dibandingkan dengan kondisi aktual di lapangan untuk mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kondisi ideal dan kondisi eksisting.
6. Tahap keenam (Feasible and Desirable Changes), hasil perbandingan digunakan untuk merumuskan perubahan yang layak diterapkan berdasarkan kondisi sosial, kelembagaan, politik, dan sumber daya yang tersedia.
7. Tahap ketujuh (Action to Improve), peneliti merumuskan rekomendasi strategi pengembangan pariwisata berbasis collaborative governance sebagai alternatif perbaikan yang dapat diterapkan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Keabsahan data dijaga melalui empat kriteria trustworthiness menurut Lincoln & Guba (1985), yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. *Credibility* dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta member checking kepada beberapa informan utama untuk memastikan kesesuaian hasil interpretasi peneliti dengan informasi yang disampaikan informan. *Transferability* dijaga dengan penyajian deskripsi konteks penelitian secara rinci sehingga memungkinkan pembaca menilai keterterapan hasil penelitian pada konteks lain. *Dependability* dilakukan melalui audit trail terhadap seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga proses analisis. *Confirmability* dijaga dengan mendokumentasikan seluruh hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pendukung, serta proses analisis sehingga hasil penelitian dapat ditelusuri kembali.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN/ RESEARCH FINDING AND DISCUSSION

Penelitian ini dianalisis dengan Pengembangan Destinasi Pariwisata Jatigede terutama menara Kujang Sepasang harus dilakukan secara berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Peneliti menganalisis Pengembangan pariwisata Jatigede Menara Kujang Sapsang ini di sinkronisasikan dengan teori Anshell & Gash yang terdiri dari 4 variabel utama dalam collaborative governance diantaranya kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaboratif, dengan penjelasan sebagai berikut :

Kondisi Awal (Starting Conditions)

Berdasarkan Teori Anshell Gash terkait dengan Collaborative Governance, kondisi awal merupakan suatu hal yang menggambarkan latar belakang hubungan antar pihak sebelum proses kolaborasi dimulai. Kondisi awal dari pengembangan pariwisata jatigede ini digali dengan menggunakan metode studi dokumen, observasi dan wawancara. Menara Kujang Sapsang diresmikan pada tanggal 13 Agustus 2023 oleh Gubernur Ridwan Kamil pada saat itu. Fakta dilapangan menggambarkan bahwa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Jatigede, Bapak Wuddan, sebagai berikut :

“Menara kujang sapsang setinggi 99 Meter yang dilengkapi oleh lift, untuk menikmati panorama waduk jatigede. Menara Kujang sapsang jatigede ini terdiri dari 3 lantai bawah dengan pondasi ala patung liberty yang akan ditampung fasilitas seperti museum kujang dan pusat kuliner, pada saat awal peresmian sangat mencuri perhatian para wisatawan yang berdatangan untuk berwisata ke menara kujang sapsang. Kondisinya pada saat ini setelah diresmikan semakin kesini pengunjung semakin menurun, dikarenakan beberapa yang harus segera diperbaiki. Dimulai dari akses jalan, infrastruktur

serta fasilitas penunjang yang ada di kawasan menara kujang sapsang harus diseriusi.” (Camat Jatigede - 10 Desember 2024)

Berdasarkan hasil observasi lapangan, Pengembangan pariwisata di kawasan jatigede ini tidak bisa dilepaskan dari konteks pembangunan waduk jatigede yang menyebabkan relokasi lebih dari 28.000 jiwa, dengan menyisakan ketimpangan relasi antara pemerintah dan masyarakat yang merujuk pada masyarakat yang terdampak. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan kapasitas masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata namun disisi lain ada kesadaran kolektif terhadap potensi pariwisata sebagai sumber ekonomi yang baru.

Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi. Hal yang ditekankan dalam desain kelembagaan ini adalah bagaimana aturan main dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi, bagaimana forum yang dibentuk, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas serta bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi. Fakta yang ada dilapangan, Regulasi yang ada di Kabupaten Sumedang telah semakin lengkap dan progresif, mulai dari perencanaan strategis (RIPD 2021–2025), tata kelola desa wisata, hingga peraturan kepariwisataan terbaru (2025). Landasan hukum ini sangat relevan dan mendukung pengembangan pariwisata Menara Kujang Sapsang, baik dari aspek kelembagaan, infrastruktur hukum, dan distribusi manfaat ekonomi ke masyarakat lokal. Regulasi secara merujuk untuk pengembangan kawasan menara kujang sapsang belum secara spesifik ada.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, pengelolaan wisata menara kujang sapsang kawasan jatigede ini harus menjadi prioritas utama dalam hal pengembangan pariwisata, melihat kondisi potensi yang ada di kawasan tersebut dapat membuat masyarakat sekitar berdampak untuk ekonominya.

Perbup desa wisata terutama kawasan menara kujang sapsang jatigede ini harus segera dibuat agar legalitas dalam pengelolaan kawasan ini dapat optimal.

Kepemimpinan

Peran pemerintah Daerah Sumedang sebagai fasilitator aktif memimpin pembangunan kawasan menara kujang sapsang sehingga bisa diresmikan oleh gubernur jawa barat pada masa Ridwan Kamil di Tahun 2023 bulan Agustus. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang juga mampu mendorong dan menggandeng akademisi, investor, komunitas lokal dan pengusaha pariwisata untuk bersama sama mengoptimalkan kawasan menara kujang sapsang sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara bersama-sama.

Adanya peran dari Pemerintahn Provinsi Jawa Barat pada saat itu, termasuk untuk mendorong konektivitas infrastruktur jalan, akses told an koneksi ke bandara kertajati.

Peran kepemimpinan dalam mengptimalkan menara kujang sapsang ini juga mengajak seluruh masyarakat lokal untuk berpartsstisipasi aktif dalam mengoptimalkan kawasan menara kujang sapsang, pemerintah daerah kabupaten sumedang memastikan bahwa masyarakat sekitar menara tidak sekedar menjadi pnenonton namun juka sebagai pelaku manfaat ekonomi.

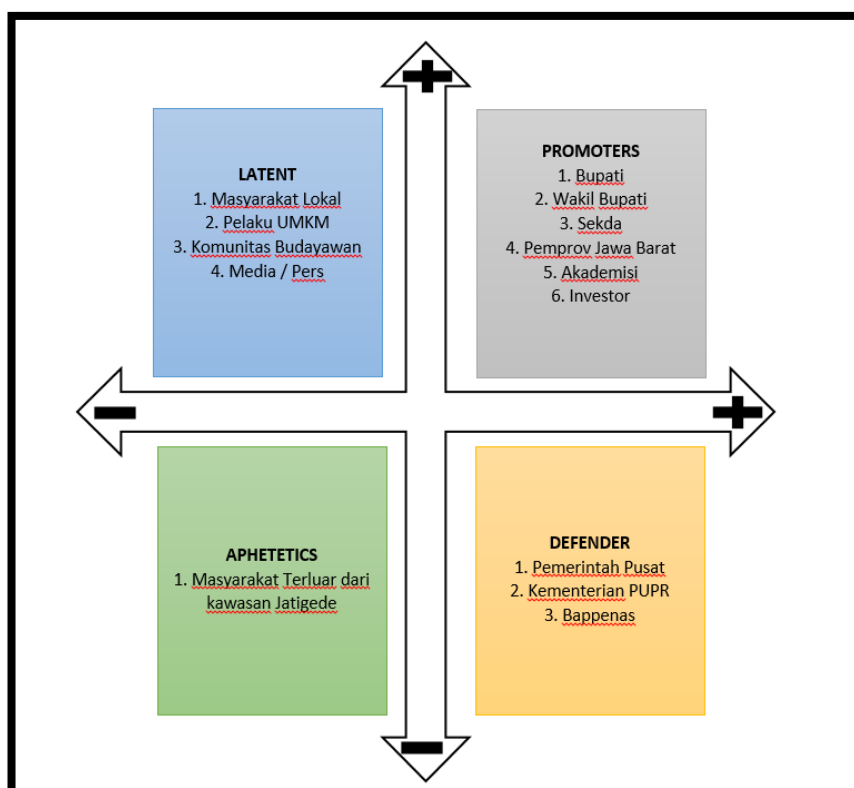
Berdasarkan hasil observasi lapangan, yang perlu dilakukan sekarang yaitu Bupati sebagai Fasilitator utama harus mampu mewujudkan penyelenggaraan forum terbuka yang melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat agar dialog terbuka seperti ini dapat menguntungkan satu sama lain. Fasilitator utama harus mampu menyediakan akses usaha di kawasan wisata serta memastikan bahwa masyarakat sekitar utamanya terlibat dalam pembangunan wisata menara kujang sapsang ini.

Dengan membangun forum komunikasi dan sistem pendampingan, kepemimpinan kolaboratif ini akan membuka ruang diskusi yang lebih adil yang melibatkan seluruh elemen yang berkaitan dalam pengambilan suatu kebijakan, sehingga pengembangan pariwisata menara kujang sapsang akan berdampak baik bagi seluruh elemen.

Proses Kolaboratif

Proses kolaboratif menurut anshell dan gash merupakan suatu hal yang utama dalam hal kolaborasi. Satu sama lain yang saling berkesinambungan diperlukan disini . Proses kolaboratif menjadi hal yang penting dalam pengembangan pariwisata meara kujang sapsang. Fakta dilapangan Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas pariwisata kabupaten sumedang bahwa “ Dalam pengelolaan pariwisata, pemerintah tudak bisa berjalan sendiri, harus dilaksanakan kolaborasi antar seluruh actor. Hal ini akan membuat pengembangan pariwisata jenis apapaun lebih berdampak dan menguntungkan secara rata dan adil baik pemerintah maupun sektor lain. Dalam pengelolaan pengembangan kawasan jatigede ini jika dikembangkan secara optimal harus dilakukan secara serius dengan melibatkan dan menghadirkan seluruh actor.” (Kadisparbudpora Sumedang, 25 Juni 2025)

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, pemetaan stakeholder diklasifikasikan berdasarkan dua dimensi utama yaitu tingkat kepentingan (Interest) dan tingkat kekuasaan (Power) yang kemudian dibagikan menjadi empat kelompok a.Promoters (Kekuatan Tinggi, Kepentingan Tinggi); b.Defender (Kekuatan Tinggi, kepentingan rendah); c.Latents (kekuatan rendah, kepentingan rendah); d.Apathetics (Kekuatan rendah, kepentingan rendah) dalam pengembangan pariwisata menara kujang sapsang yaitu sebgaai berikut :



Pemetaan Stakeholders berdasarkan Power and Interest

1. Dialog Tatap Muka

Kolaboratif dilakukan secara dua arah antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Sehingga akan menciptakan komunikasi dua arah, yang salingbertukar pemikiran.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, pemerintah kabupaten sumedang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memfasilitasi berbagai forum diskusi, rapat koordinasi dan musyawarah desa dengan pelaku lokal, seperti perangkat desa, BUMDes, tokoh masyarakat, Komunitas pegiat wisata, serta perwakilan masyarakat jatigede, akademisi dan para investor. Namun dialog ini belum dilakukan secara sistematis dan periodic sehingga kurang meratanya persamaan persepsi dalam pengembangan pariwisata menara kujang sapsang kawasan jatigede ini.

“Forum konsultasi publik dalam hal pengembangan pariwisata di jatigede harus dilakukan secara terstruktur terperinci dan jelas outputnya seperti apa” (Camat Jatigede, 10 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maaka bisa tersirat bahwa forum komunikasi antara seluruh stake holder harus dilakukan secara periodic dan jelas agar pengembangan pariwisata kawasan menara kujang sapsang dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan cita cita pemerintah kabupaten sumedang untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu dalam keberhasilan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sumedang.

2. Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi.

Berdasarkan observasi dilapangan, pemerintah kabupaten sumedang menunjukkan komitmen dalam membangun kepercayaan untuk para stake holder yang terlibat dalam pengembangan pariwisata menara kujang sapsang dengan adanya perbaikan jalan lingkak utara jatigede / akses jalan yang diperbaiki untuk menunjang pariwisata yang ada di kawasan jatigede, dan pemerintah kabupaten sumedang mempromosikan pariwisata terutama emnara kujang sepasang secara transparan.

3. Komitmen dalam Proses Kolaborasi

Adanya rasa percaya dalam kolaborasi menimbulkan komitmen, dimana komitmen ini menjadi suatu hal yang penting dalam proses kolaborasi untuk mencapai tujuan.

“Sebagian besar aktor telah menunjukkan komitmen terhadap proses pengembangan, terutama pemerintah daerah, tokoh lokal, dan komunitas kreatif di Jatigede. Hal ini terlihat dari konsistensi keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan, promosi wisata, dan festival budaya yang diselenggarakan secara berkala. Namun, komitmen sektor swasta, termasuk investor dan pelaku usaha pariwisata, masih terbatas karena belum adanya skema insentif yang jelas dan jaminan keberlanjutan program dari pemerintah” (Kadisparbudpora Sumedang, 10 Desember 2025)

Berdasarkan hasil observasi lapangan, pemerintah kabupaten suemdang saat ini harus melakukan kerjasama secara kolaboratif bersama elemen elemen terkait agar menara kujang sapsang yang telah ada dapat dikembangkan menjadi salah satu objek pariwisata yang menarik peminat para wisatawan.

4. Pemahaman Bersama

Disesuaikan dengan visi sumedang, yaitu Sumedang Simpati, Menuju Indonesia emas tahun 2045, salah satunya harus mampu menjadikan pariwisata menjadi salah satu sumber kekuatan untuk pembangunan pemerintah daerah kabupaten sumedang. Tingkat pemahaman bersama terhadap visi dan arah pengembangan destinasi masih dalam tahap pembentukan. Terdapat perbedaan sudut pandang antara pemerintah daerah yang mengutamakan pengembangan berbasis branding destinasi unggulan (ikonik dan monumental), dengan masyarakat lokal yang menginginkan manfaat ekonomi langsung dan pemberdayaan lokal. Upaya untuk menyatukan pemahaman ini dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan (masterplan) dan peninjauan RTRW, namun keterlibatan multipihak dalam proses penyusunan masih bersifat top-down dan belum sepenuhnya partisipatif.

5. Hasil Antara

“Beberapa hasil antara dari proses kolaboratif telah mulai terlihat, seperti meningkatnya kunjungan wisatawan lokal ke kawasan Menara Kujang Sapasang, terbentuknya beberapa unit usaha masyarakat (UMKM, penyewaan perahu, kuliner), serta tumbuhnya komunitas pemuda pelopor pariwisata. Namun, hasil ini masih belum optimal karena belum ditunjang oleh sistem manajemen terpadu, standar pelayanan, dan kelembagaan pengelola yang profesional. Proses kolaborasi masih berpotensi berkembang apabila didukung oleh desain tata kelola yang lebih inklusif dan koordinatif”. (Camat Jatigede, 25 Juni 2025)

Perumusan Model Pengembangan Pariwisata Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang

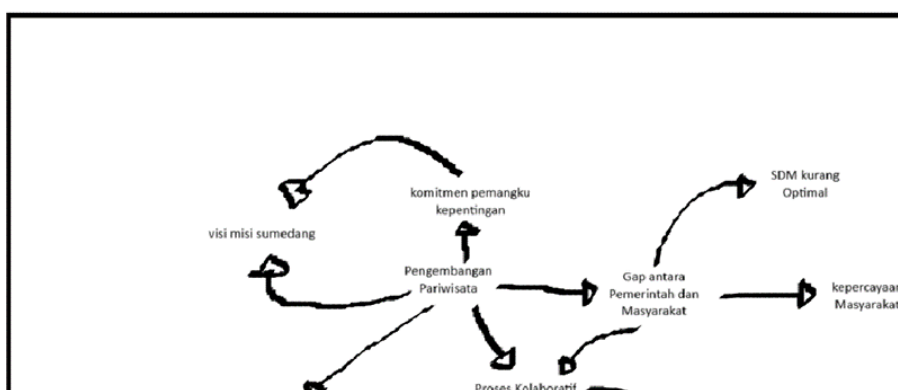
Selanjutnya untuk Model pengembangan pariwisata waduk jatigede di kabupaten sumedang menggunakan alat analisis Soft System Methodology yang dikembangkan oleh Checkland, dan menggunakan analisis CATWOE, dengan sebagai berikut :

a. Problem Situation Unstructure

Tahap pertama dari SSM yaitu dengan mengkaji dan mengolah masalah terutama maslaah yang dianggap tidak terstruktur atau memiliki gap dengan konidis ideal. Pada proses ini pihak peneliti mengkaji dan menganalisis terkait isu problematic yang ada dalam pengembangan pariwisata waduk jatigede di pemerintahan kabupaten sumedangd engan sebagai berikut 1.Adanya ketimpangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat 2.Regulasi secara khusus yang mengatur terkait pengembangan pariwisata belum menara kujang sapasang belum ada 3.Belum adanya forum yang secara khusus merencanakan terkait kawasan wisata menara kujang sapasang 4.Pihak yang terkait masih didominasi oleh pemerintah, belum terlalu melibatkan investor untuk dikerjasamakan secara optimal 5.Dialog secara terbuka dengan seluruh stake holder belum ada 6.Komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan untuk pengembangan pariwisata menara kujang sapasang belum muncul untuk menjembatani pengembangan pariwisata ini.

b. The Problem Situational Expressed Rich Picture

Berdasarkan analisis mengenai isu permasalahan yang ada dalam pengembangan pariwisata waduk jatigede terutama menara kujang sapasang harus melakukan perbaikan kedepan. Berdasarkan hasil wawancara, studi dokumen dan observasi lapangan dalam pengembangan pariwisata waduk jatigede di kabupaten sumedang dituangkan dalam Rich Picture sebagai berikut



Berdasarkan rich picture di atas terlihat bahwa dalam melakukan pengembangan pariwisata kawasan jatigede menara kujang sapasang di pemerintah kabupaten sumedang, terdapat beberapa hal yang menjadi acuan bagi Kabupaten Sumedang. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan pariwisata menara kujang sapasang terutama ketika mempertimbangkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah bersifat terbatas. Proses pengembangan pariwisata ini sangat kompleks melibatkan beberapa stake holder. Apa yang digambarkan dalam rich picture ini kemudian diolah untuk menyusun model konseptual pada soft system methodology (SSM) sesuai dengan metode penelitian

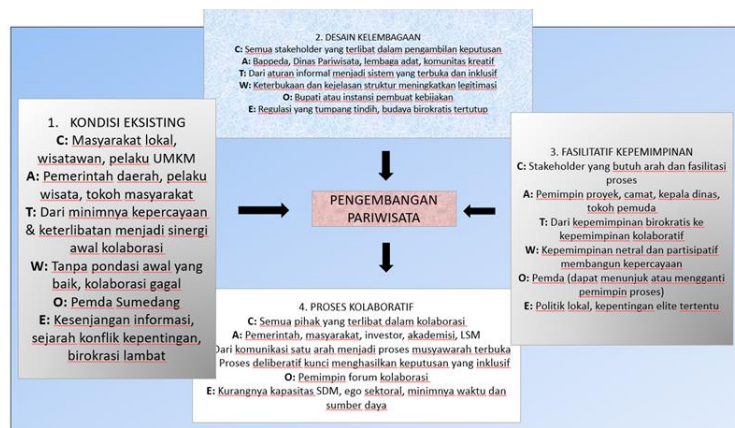
c. Root Definition dan Model Pengembangan Pariwisata Jatigede

Menghadapi permasalahan yang telah dirumuskan dalam root definition di atas, hal yang dibutuhkan berikutnya adalah dibutuhkannya intervensi untuk memperbaiki Pengembangan pariwisata menara kujang sapasang ke depan. Guna menganalisis intervensi yang tepat, dilakukan beberapa analisis untuk memetakan faktor-faktor berpengaruh dalam proses Pengembangan Pariwisata kawasan jatigede di Kabupaten Sumedang. Analisis tersebut meliputi analisis CATWOE.

No.	Komponen CATWOE	Hasil Definisi
1	<i>Customer</i>	Masyarakat Jatigede, Wisatawan, Pelaku UMKM
2	<i>Aktor</i>	Pemda, BUMDes, Komunitas Lokas, Investor, Akademisi, Media
3	<i>Transformasi</i>	Dari kondisi terfragmentasi menjadi sitem kolaboratif
4	<i>Worldview</i>	Kolaboratif menjadi kunci untuk pengembangan pariwisata menara kujang sapasang
5	<i>Owner</i>	Pemerintah Kabupaten Sumedang (Bupati)
6	<i>Environmental constraints</i>	Aturan Pemerintah Pusat, Keterbatasan Anggaran, Dinamika Sosial Politik

d. Conceptual Models Of The Systems Named in The Root Definitions

Dalam tahap ini, model pengembangan pariwisata dibentuk berdasarkan akar akar permasalahan yang telah dilampirkan di atas.



e. Comparison of Models and Real World

Pada tahap ke 5 yaitu membandingkan rancangan model dengan dunia nyata atau real world atau dapat kita sebut dengan kondisi existing Melalui wawancara, studi dokumen dan observasi dilapangan telah di dapat point-point masukan dalam rangka melakukan transformasi model saat ini menjadi model yang diharapkan. Melalui gambaran yang menunjukkan perbandingan maka akan diperoleh model yang ideal yang nantinya akan dirumuskan pada tahap ke-6 menjadi rumusan tindakan transformasi real world menjadi perubahan yang diinginkan secara sistematis. Perbandingan antara model dan kondisi nyata dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Real World	Usulan Rekomendasi
1.	Regulasi	Sudah ada namun belum merujuk tepat sasaran pada pengembangan Menara Kujang sapsang	Dibentuk regulasi terkait pengembangan pariwisata yang khusus untuk menara kujang sapsang,
2.	Dukungan Yang kuat	Sudah ada	Perlu tertulis dalam komitmen bersama
3.	Kolaborasi dengan berbagai pihak stakeholder	Saat ini kolaborasi belum optimal karena belum ada regulasi yang jelas. Sehingga para pihak yang akan berinvestor bellum terlalu yakin untuk sama sama membangun dan mengembnagan pariwisata menara kujang sapsang	Kolaborasi antar stakeholder harus dilakukan secara multisektoral agar output dari pariwisata menara kujang sapsang dapat dirasakan manfaatnya secara bersama sama dan saling menguntungkan baik untuk pemeirntah maupun masyarakat lokal.
4.	Merujuk pada visi misi sumedang	Sudah merujuk pada visi misi sumedang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sekktor pariwisata	

5.	Komitmen	Komitmen antara pemerintah daerah belum optimal	Komitmen harus dibentuk dari sektor terbawah tingkat masyarakat sampai dengan pemerintah daerah (Bupati)
----	----------	---	--

Berdasarkan hasil wawancara, studi dokumen dan observasi lapangan ada beberapa yang harus ditambahkan dalam model pengembangan pariwisata menara kujang sapsang di jatigede. Yaitu branding terkait pariwisata harus diketahui oleh seluruh public.

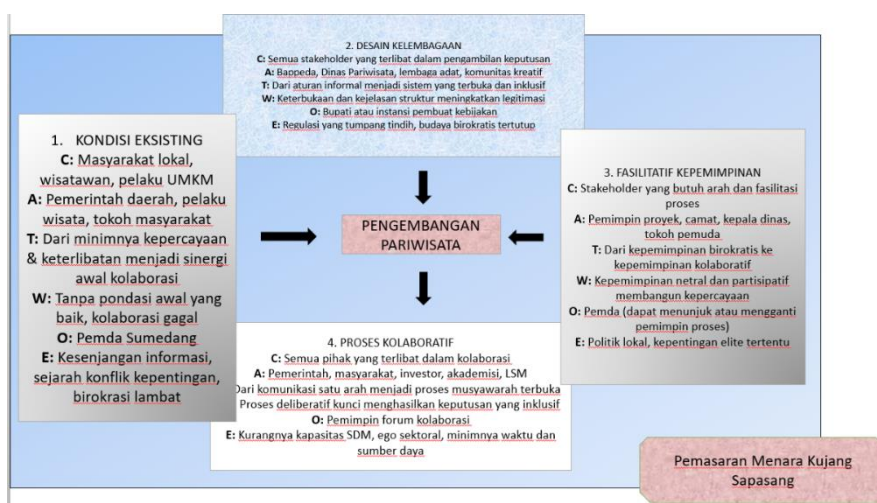
f. Changes Systematically Desirable, Culturally Feasible

Beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan untuk penegmabngan pariwisata jatigede menara kujang disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang sampai dengan terciptanya pengembangan menara kujang sapsang yang optimal

1. Penyusunan regulasi khusus pengelolaan wisata jatigede menara kujang sapsang
2. Penyusunan sk Tim pengelolaan pariwisata menara kujang sapsang jatigede kabupaten sumedang
3. Mengembangkan produk wisata umkm melibatkan masyarakat sekitar
4. Mengembangkan produk wisata tematik berbasis budaya
5. Menegembangkan wisata edukatif religi serta petualangan di kawasan menara kujang sapsang jatigede
6. Integrasi konsep ekowisata dan pariwisata berkelanjutan
7. Pengembangan jalur dan aksesibilitas wisata (perbaikan akses jalan serta sarana prasarana dan invrastruktur)
8. Digitalisasi layanan wisata

g. Action To Improve The Situation

Model pengembangan pariwisata final dan disempurnakan berdasarkan beberapa rekomendasi untuk disempurnakan dalam pengembangan pariwisata menara kujang sapsang diantaranya :



Berdasarkan model pengembangan tersebut disempurnakan dengan ditambahkan adanya pemasaran menara kujang sapsang.

Implementasi dari model pengembangan pariwisata menara kujang sapsang tersebut diantaranya

1. Regulasi yang kuat

Pertama tama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten sumedang yaitu menyusun perbup terkait pengelolaan pariwisata menara kujang sapasang, kemudian menyusuk SK Tim pengelolan pengembangan pariwisata menara kujang sapasang. Dengan adanya regulasi yang jelas, akan menarik pihak lain untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata menara kujang sapasang.

2. Dukungan Pemerintah yang Kuat

Dukungan pmerintah daerah yang kuat disini artinya, Bupati secara sadar berdasarkan Visi Misi Sumedang untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Menara kujang sapasang merupakan salah satu wilayah yang potensial untuk dikelola sampai dengan menjadi pariwisata unggulan yang siap bersaing dikelas internasional. Peran bupati disini harus konsisten dari mulai pengembangan hingga nanti pengelolaan secara berkelanjutan.

3. Pentahelix melibatkan seluruh stake holder

Penegmbangan pariwisata harus dilakukan secara multi sektoral, dimulai dari membangun kepercayaan masyarakat dengan dilibatkan secara aktif dari tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

4. Komitmen bersama

Setelah adanya dialg terbuka secara berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan, perlu diadakan komitmen bersama secara tertulis yang kemudian dijadikan Surat keputusan bersama untuk menjamin dan membangun kepercayaan multi sektoral dalam pengembangan pariwisata menara kujang sapasang jatigede ini.

5. Pemasaran menara kujang sapasang

Seteklah tahapan demi tahapan dilalui, hal yang paling utama dari keseluruhannya yaitu adanya informasi yang tersebar keseluru pihak, sehingga seluruh pihak diluar kabupaten sumedang tahu bahwa ada pariwisata menara kujang sapasang dikabupaten sumedang. Branding ini sangat diperlukan jika disesuaikan dengan jaman yang serba digital ini.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI/ CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang model pengembangan pariwisata waduk jatigede di pemerintah kabupaten sumedang, maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah dengan sebagai berikut :

1. Pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh kabupaten sumedang secara keseluruhan belum dilaksanakan sesuai dengan teori collaborative governance dari Anshell Gash, dengan sebagai berikut

a. Kondisi Awal

Menara Kujang Sapasang yang diresmikan oleh Gubernur pada masa Ridwan Kamil harus terus dioptimalkan dengan penyesuaian yang ada sekarang.

b. Desain Kelembagaan

peraturan yang membalut untuk pengembangan pariwisata di menara kujang sepasang belum terlalu spesifik mengarah pada objek tertentu

c. Fasilitasi kepemimpinan

peran pemimpin atau bisa dikatakan bupati, belum menjadi jembatan yang optimal dalam proses pengembangan menara kumpang sapsang ini. Seluruh sektor harus dijembatani oleh peran pemimpin sebagai dasar untuk komitmen yang bagus dalam pengembangan pariwisata menara kumpang sapsang ini.

d. Proses Kolaboratif

proses kolaborasi dalam pengembangan pariwisata di menara kumpang sapsang ini belum dilakukan secara optimal karena belum ada regulasi yang aten, sehingga parastake holder akan maju mundur untuk bekerja sama dalam hal ini.

2. Kendala yang dihadapi

Ada ebebrapa temuan yang menjadi hambatan atau kendala dalam pengembngan menara kumpang sapsang diantaranya, adanya gap antara pemerintah daerah dengan masyarakat, peran pemerintah belum optimal dalam menjembatani pengembangan pariwisata menara kumpang sapsang ini, para investor belum berkolaborasi secara optimal untuk pengembangan menara kumpang sapsang ini.

3. Model pengembangan pariwisata menara kumpang sapsang di pemerintah kabupaten sumedang dilakukan menggunakan metode SSM dengan analisis CATWOE

Rekomendasi

Berdasarkan hasil simpulan penelitian terhadap model pengembangan pariwisata waduk jatigede di pemerintah kabupaten sumedang, maka proses pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan proses kolaborasi yang baik dengan regulasi yang jelas dan sudah ada

REFERENSI/ REFERENCE

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Baggio, R., Cooper, C., & Scott, N. (2019). Network analysis and tourism: From theory to practice. *Network Analysis and Tourism*.
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 411–421.
- Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet – The state of eTourism research. *Tourism Management*, 29(4), 609–623.
- Checkland, P., & Scholes, J. (1999). *Soft systems methodology in action*. John Wiley & Sons.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). *Community-based tourism: a success?*
- Hall, C. M., & Page, S. J. (2020). Geography and the study of events. In *The Routledge handbook of events* (pp. 208–228). Routledge.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Sage. *Newbury Park*.
- Nunkoo, R., Wen, J., & Kozak, M. (2022). *Handbook on tourism, public health and wellbeing*. Edward Elgar Publishing.
- Patton, M. Q., McKegg, K., & Wehipeihana, N. (2015). *Developmental evaluation exemplars: Principles in practice*. Guilford publications.
- Rangkuti, F. (2018). *Measuring Customer Satisfaction Teknik Mengukur Strat. Meningk. Kep. Plg.*

Gramedia Pustaka Utama.

- Rasoolimanesh, S. M., Seyfi, S., Rastegar, R., & Hall, C. M. (2021). Destination image during the COVID-19 pandemic and future travel behavior: The moderating role of past experience. *Journal of Destination Marketing & Management*, 21, 100620.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (Vol. 6). Sage Thousand Oaks, CA.